

ABSTRAK

Judul Tesis ini adalah “**Kewenangan Diskresi Kejaksaan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pendekatan *Restorative Justice***”, dengan permasalahan yang dikaji yaitu kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan *restorative justice* dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice*.

Metode penelitian penulisan tesis ini adalah dengan menggunakan tipe penelitian normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder seperti asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, dengan pendekatan penelitian berupa *case approach* serta sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian preskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan mendapatkan saran-saran mengenai kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang efektif dalam hal kerugian negaranya kecil berdasarkan pendekatan *restorative justice*.

Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 merupakan upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum dalam rangka tercapainya kedamaian dan ketentraman di masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai upaya memberantas tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam isinya adalah menginstruksikan kepada seluruh Kejaksaan Tinggi agar dalam penanganan tindak pidana korupsi, masyarakat yang dengan kesadaran telah mengembalikan kerugian negara perlu dipertimbangkan untuk tidak ditindaklanjuti atas berlaku asas *restorative justice*. Surat Edaran tersebut dikeluarkan guna memfokuskan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang besar, namun kenyataannya tetap saja tindak pidana korupsi dengan kerugian yang kecil masih banyak tetap diproses untuk dilakukan pembuktian di persidangan yang menggunakan anggaran cukup besar, sehingga tidak efektif dan efisien.

Kewenangan diskresi Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana korupsi yang kerugian keuangan negaranya tidak melebihi batasan penggunaan anggaran dapat dilaksanakan, sehingga terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi sistem pengembalian keuangan negara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam menerapkan kewenangan diskresi guna mengoptimalkan penyelesaian tindak pidana korupsi dengan pendekatan *restorative justice* yaitu kurangnya pemahaman para penyelidik terhadap pola penanganan perkara tindak pidana korupsi yang berkualitas, dan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 tersebut tidak memiliki kekuatan atau dasar hukum yang kuat seperti peraturan perundang-undangan sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil tetap dilakukan pembuktian di persidangan.

Kata Kunci: **Diskresi; Jaksa Agung; Keadilan; Surat Edaran, *Restorative Justice*.**

ABSTRACT

The title of this thesis is "The Attorney's Discretionary Authority in the Settlement of Criminal Acts of Corruption Based on the Restorative Justice Approach", with the problems studied, namely the discretionary authority of the Prosecutor's Office in handling corruption crimes based on the restorative justice approach and the obstacles faced by the Prosecutor's Office in implementing discretionary authority in order to optimize settlement of criminal acts of corruption with a restorative justice approach.

The research method of writing this thesis is to use the type of normative research. Normative research is legal research that uses secondary data sources such as principles and doctrines in legal science, with a research approach in the form of a case approach and the nature of the research used is prescriptive research which is research that aims to obtain suggestions regarding the discretionary authority of the Public Prosecutor's Office in Effective handling of corruption cases in terms of small state losses based on the Restorative Justice approach.

The Circular Letter of the Deputy Attorney General for Special Crimes Number: B-113/F/Fd.1/05/2010 dated 18 May 2010 is a law enforcement effort by law enforcement officers in the context of achieving peace and tranquility in society and law enforcement officers as an effort to eradicate crime. corruption, one of the points in its contents is to instruct all High Prosecutor's Offices so that in handling corruption crimes, people who consciously have returned state losses need to be considered not to be followed up on the principle of restorative justice. The Circular was issued to focus on handling corruption crimes with large state losses, but still many corruption crimes with small losses are still being processed for evidence in court using a large enough budget.

The prosecutor's discretionary authority in handling corruption crimes is based on the Restorative Justice approach in handling corruption crimes whose state financial losses do not exceed the limits on the use of the budget, so that justice and balance are created for the state financial return system. The obstacles faced by the Prosecutor's Office in applying discretionary authority to optimize the settlement of corruption crimes with a Restorative Justice approach are the investigators' lack of understanding of the quality pattern of handling corruption cases, and the Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-1113/ The F/Fd.1/05/2010 dated May 18, 2010 does not have the power or a strong legal basis such as the laws and regulations so that in law enforcement against criminal acts of corruption with small state losses, evidence is still carried out in court.

Keywords: Discretion; Attorney General; Justice; Circular, Restorative Justice.